

## Pelatihan asertivitas sebagai upaya mengurangi perilaku agresif petugas pengamanan di lapas Cipinang

Pudjiono Gunawan, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=98887&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Lembaga Pemasyarakatan, di samping sebagai tempat bagi orang yang menjalani pidana akibat dari perilakunya yang melanggar hukum, juga sebagai tempat untuk memberikan pembinaan agar individu pelanggar hukum tersebut dapat menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi kembali perbuatannya.

Secara yuridis hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 namun pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, masih diwarnai dengan perlakuan agresif petugas, layaknya pada saat masa "Kepenjaraan".

Petugas pengamanan selaku pembina narapidana, dituntut untuk mampu berperilaku asertif, baik terhadap narapidana maupun kepada pimpinan yang ada di lapas. Sehingga bukan melalui perilaku agresif terhadap narapidana sebagai akibat dari adanya faktor pemicu yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Atau perilaku agresif itu sebagai media untuk melampiaskan perasaan ketidakpuasan akibat tidak mampu untuk berperilaku asertif kepada pimpinan.

Dari uraian latar belakang masalah dan permasalahan tersebut maka rumusan masalah yang diangkat adalah: "Bagaimana upaya mengurangi perilaku agresif petugas pengamanan terhadap narapidana ?"

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka disusunlah suatu program : "Pelatihan asertivitas sebagai upaya mengurangi perilaku agresif petugas pengamanan terhadap narapidana di Lapas Cipinang".

Untuk memahami batasan tentang tingkah laku yang dapat dikatakan sebagai "agresif", menurut Myers (1996) menyatakan bahwa, "perbuatan agresif adalah perilaku fisik atau lisan yang sengaja dengan maksud untuk menyakiti atau merupikan orang lain".

Pengertian asertif menunjuk pada suatu bentuk tingkah laku. Hal ini sesuai dengan pendapat Willis dan Daisley (1995), bahwa asertif merupakan suatu bentuk tingkah laku dan bukan merupakan sifat dari kepribadian (personality trait). Winship dan Kelley (dalam Solomon & Rothblum, 1985) menggambarkan tingkah laku asertif sebagai pengekspresian diri secara jujur namun tanpa melanggar hak orang lain.

Bloom dick (1975) menyatakan bahwa pelatihan asertif atau Assertive Training berdasarkan pada teori bahwa tingkah laku sosial dapat dipelajari dan karenanya dapat dihilangkan dan diganti dengan tingkah laku baru yang lebih menguntungkan atau memiliki dampak positif.

Penulis akan merujuk pada teori-teori yang berkenaan dengan agresi yang dapat terbagi dalam beberapa kelompok, yaitu kelompok teori Bawaan atau Bakat, teori Environmentalis atau teori Lingkungan, dan teori Kognitif.

Sarwono (2002) menyatakan ada beberapa faktor penyebab yang dapat mempengaruhi terhadap agresi, antara lain :

- a. Kondisi lingkungan
- b. Pengaruh kelompok
- c. Pengaruh Kepribadian dan kondisi fisik

Rancangan pelatihan asertif ini akan diuraikan dalam tahapan sesuai dengan ketentuan penyusunan suatu program pelatihan. Menurut Porteus (1997), tahapan pelatihan adalah meliputi :

- a. Analisis kebutuhan pelatihan (training needs analysis)
- b. Desain pelatihan
- c. Evaluasi

Secara umum, gambaran program pelatihan asertif akan dilaksanakan dengan pendekatan kognitif - tingkah laku, sesuai dengan yang dikehendaki Lange dan Jakubowski (1976).

Saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pelatihan asertivitas, adalah sebagai berikut :

- a. Hendaknya program pelatihan ini dimasukkan menjadi kalender pendidikan yang baku atau tetap bagi Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I (Pusdiklat), serta diwajibkan bagi petugas yang baru diangkat (calon pegawai) khususnya maupun kepada petugas yang sudah lama bertugas.
- b. Selain diadakannya pelatihan asertivitas, untuk mendukung keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan untuk mengurangi adanya jarak antara petugas administratif dan petugas pengamanan, dianggap perlu pula mengadakan pelatihan learn building, pengenalan diri, hubungan antara atasan dan bawahan, dan pelatihan-pelatihan lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dalam rangka mencapai tujuan Sistem Pemasyarakatan.